

TERTATIH MENGEJAR PEMENUHAN KEBUTUHAN

Laporan Pengukuran Indeks Barometer Sosial 2016

Tim Penyusun:

Bagus Takwin

M. Himawan Arifianto

Alfindra Primaldhi

Paksi Walandow

Sahat K. Panggabean



TERTATIH MENGEJAR PEMENUHAN KEBUTUHAN

Laporan Pengukuran Indeks Barometer Sosial 2016



Tim Penyusun:

Bagus Takwin

M. Himawan Arifianto

Alfindra Primaldhi

Paksi Walandow

Sahat K. Panggabean

Mei 2017

Didukung oleh:



Laporan ini dihasilkan atas dukungan pendanaan dari TIFA dan Ford Foundation
Isi dari buku ini sepenuhnya tanggung jawab INFID dan penulis, dan tidak
mencerminkan posisi TIFA dan Ford Foundation

DAFTAR ISI

RINGKASAN	4
KATA PENGANTAR	5
BAB 1. PENDAHULUAN	9
INDEKS BAROMETER SOSIAL SEBAGAI DETEKTOR KEADILAN SOSIAL	9
BAB 2. KEBUTUHAN PROGRAM SOSIAL	13
2.1. Kebutuhan Program Sosial	13
BAB 3. PENILAIAN WARGA TERHADAP PROGRAM SOSIAL	17
3.1. Penilaian Warga Mengenai Program Sosial Nasional	17
3.2. Penilaian Warga Mengenai Program Sosial yang Diselenggarakan oleh Kementerian	23
BAB 4. INDEKS BAROMETER SOSIAL	27
4.1. Indeks Barometer Sosial Nasional	27
Bab 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	31
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Rekomendasi	32
Daftar Pustaka	30
Lampiran	35
Kerangka Teoretik dan Metodologi	35
1. Barometer Sosial Sebagai Turunan Konsep Keadilan Sosial	35
2. Pendekatan Metodologis	36
3. Waktu Pelaksanaan	36
4. Permasalahan	36
5. Metode Riset	38
6. Jumlah Responden dan Teknik Sampling	38
7. Penyusunan Instrumen Pengukuran	39
8. Teknik Analisis Data	39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME, sehingga kami berhasil menyelesaikan Laporan Survei Barometer Sosial 2016. Laporan yang ada di tangan teman-teman semua, merupakan salah satu wujud komitmen INFID dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia.

Survei Barometer Sosial 2016 merupakan produk pemantauan serta melakukan audit sosial terhadap kinerja dan pencapaian hasil pembangunan dengan menggunakan kebijakan program sosial sebagai indikatornya. Survei ini merupakan bentuk akuntabilitas sosial dimana warga menilai berbagai program kebijakan sosial yang telah dijalankan pemerintah selama ini, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Subsidi Pupuk, Jaminan Persalinan (Jampersal), dan sebagainya. Tidak hanya itu, Laporan Survei Barometer Sosial 2016 juga dilengkapi dengan pengukuran persepsi warga mengenai sumber, faktor dan cara mengatasi ketimpangan sosial.

Pelaksanaan Survei Barometer Sosial 2016 dilakukan selama tiga bulan sejak akhir Juli 2016 hingga Oktober 2016, di 34 Provinsi dengan jumlah responden sebanyak 2010 orang. Survei Barometer Sosial 2016 merupakan survei yang ketiga, setelah yang pertama dilakukan pada 2014.

Hasil Survei Barometer Sosial 2016 ini, kiranya dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas program-program sosial yang telah dijalankan selama ini dan menambah jenis-jenis program sosial bagi warga di masa mendatang. Pengambil kebijakan diharapkan juga bisa memanfaatkan metode Survei Barometer Sosial 2016 sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja pembangunan yang telah dijalankan, sebagai bentuk akuntabilitas pembangunan dari pemerintah. Bagi masyarakat sipil, hasil survei ini bisa menjadi rujukan dalam melakukan kajian lebih lanjut dan kerja-kerja advokasi kebijakan pembangunan ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan Survei Barometer Sosial 2016.

Jakarta, 20 Mei 2017

Hamong Santono
Senior Program Officer SDGs INFID

RINGKASAN

Indeks Barometer Sosial merupakan metode pemantauan serta melakukan audit sosial terhadap kinerja dan pencapaian hasil pembangunan dengan menggunakan kebijakan program sosial sebagai indikatornya. Ini kali ketiga pengukuran Indeks Barometer Sosial diadakan. Sebelumnya Indeks Barometer Sosial 2015 diperoleh dengan mengukur persepsi warga tentang kinerja pencapaian hasil pembangunan tahun 2014 dan melihat sumber serta faktor dari ketimpangan sosial.

Indeks Barometer Sosial 2016 menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 2010 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Satu hal yang menonjol dari pengukuran Indeks Barometer Sosial 2016 yang dilakukan INFID adalah kurangnya program sosial yang memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, sementara menurut warga membutuhkan penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah. Sebesar 96,1% responden survei menyatakan butuh kerja yang layak dengan upah minimum regional. Kinerja kementerian dinilai lebih positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja kementerian terkait program sosial lebih tertangkap oleh warga paling baik ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nilai 4,5 untuk kualitas program dan 4,9 untuk kebermanfaatan program.

Dalam penilaian warga di tahun 2016, program sosial yang diselenggarakan pemerintah belum semuanya sesuai dan memenuhi kebutuhan warga. Hal ini ditunjukkan 99% responden menyebutkan program sosial yang dibutuhkan adalah pelayanan kesehatan, namun sebanyak 93,4% responden menjawab program sosial yang diketahui adalah beras untuk keluarga miskin. Enam program sosial yang dinilai adalah JKN, KKS, KUR, PIP, PKH, dan RASKIN. Sebanyak 62,5% responden mempersepsi kejelasan program sosial RASKIN dan kejelasan program lainnya dibawah 50%.

Penilaian rata-rata responden sebanyak dibawah 50% untuk program sosial masih belum tepat sasaran pada mereka yang membutuhkan, belum cukup mudah untuk didapatkan, prosesnya belum cukup cepat, namun dianggap cenderung tidak membebani, walau barang dan jasa yang diterima cenderung sesuai dengan semestinya dan cenderung bermanfaat. Secara umum, hal ini yang menjadi pertimbangan warga untuk mempersepsikan bahwa pelaksanaan program pemerintahan sudah cenderung sesuai dengan aturan serta cenderung baik dan bermanfaat. Sebanyak 52,3% responden menjawab program RASKIN sesuai dengan aturan, sedangkan 5 program lain bernilai 30% - 41,5%.

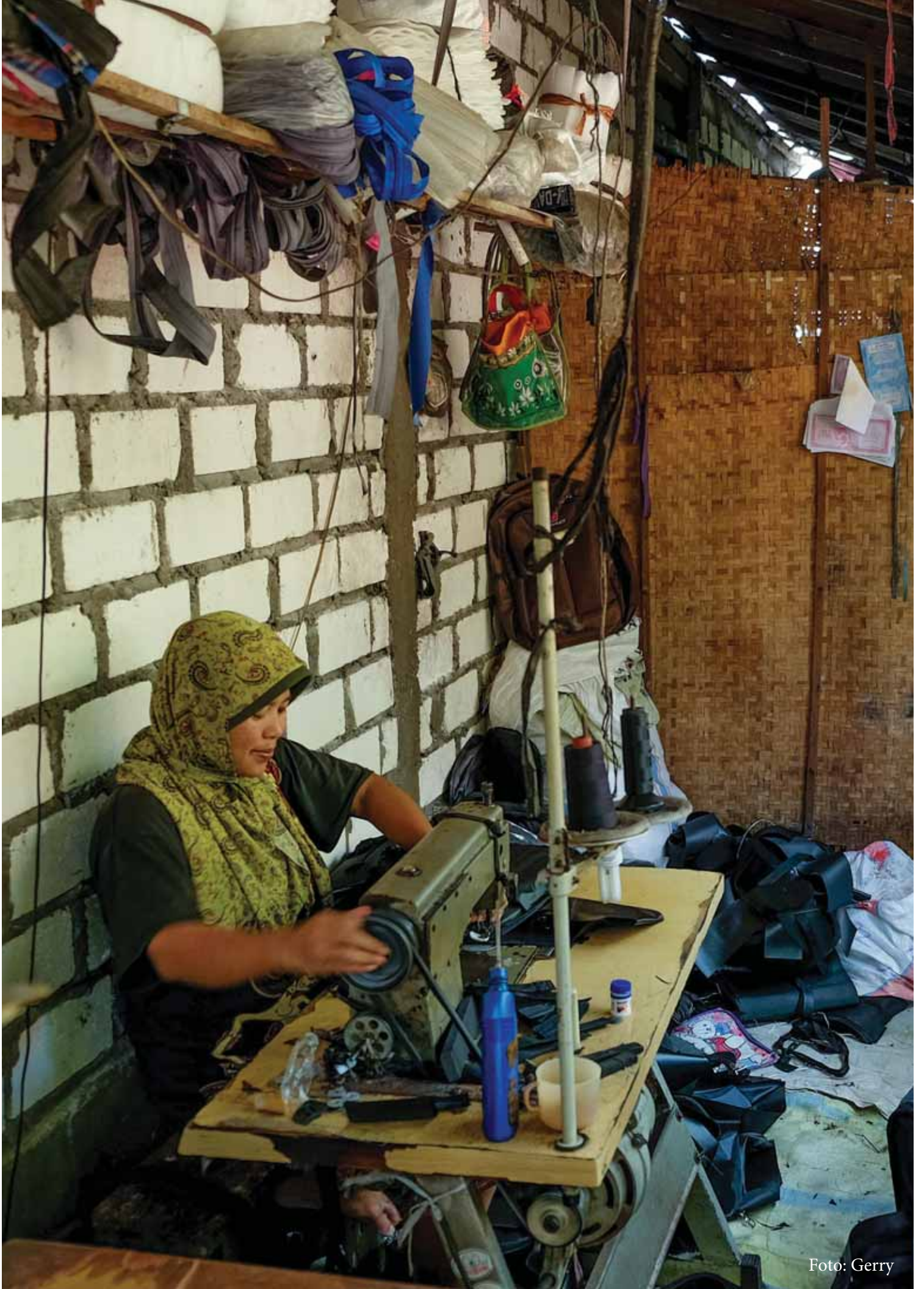


Foto: Gerry

BAB 1

PENDAHULUAN

INDEKS BAROMETER SOSIAL SEBAGAI DETEKTOR KEADILAN SOSIAL

“The opposite of poverty is not wealth. In too many places, the opposite of poverty is justice.”

~ Bryan Stevenson

Usaha pengentasan kemiskinan semestinya juga adalah usaha untuk menghadirkan keadilan. Seperti yang dikemukakan Bryan Stevenson, aktivis keadilan sosial dan pendiri lembaga bantuan hukum Equal Justice Initiative di Alabama, lawan kemiskinan bukanlah kekayaan, melainkan keadilan. Perjuangan mengentaskan kemiskinan dan keadilan adalah dua sisi dari mata uang. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketidakadilan. Kemiskinan adalah efek dari ketidakadilan.

INFID menyadari keterkaitan antara kemiskinan dengan ketidakadilan, dan hendak ikut serta dalam upaya menghilangkan keduanya melalui berbagai upaya. Salah satu upaya awal yang perlu dilakukan adalah mendeteksi ketidakadilan sosial yang berlangsung di masyarakat. Bentuk konkritnya adalah mengidentifikasi seberapa jauh program sosial dijalankan pemerintah dan apakah itu memenuhi kriteria keadilan distributif dan prosedural. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan survei untuk mengukur sejauh mana program sosial yang dijalankan pemerintah Indonesia sesuai dengan kriteria keadilan melalui pengukuran Indeks Barometer Sosial. Di tahun 2016, INFID melakukan pengukuran Indeks Barometer Sosial yang ketiga kalinya.

Seperti yang sudah dilansir di tahun 2014 dan 2015, Indeks Barometer Sosial adalah produk pemantauan dan audit sosial tahunan terhadap kinerja dan capaian

pembangunan yang berupaya mengukur kinerja dan capaian tersebut dari kacamata warga negara. Seperti yang sudah dicanangkan, hasil pengukuran akan dilansir setiap tahun. Setelah pengukuran Barometer Sosial 2014 dan 2015, kini INFID akan melakukan pengukuran Barometer Sosial 2016 yang mengukur penilaian warga mengenai program sosial yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia selama tahun 2015.

Barometer Sosial merupakan indikator keadilan sosial. Berangkat dari konsep dasar, perlunya keadilan sosial diperjuangkan. Barometer sosial yang menjadi indikator dari seberapa jauh negara mengupayakan keadilan sosial melalui bantuan-bantuan sosial dapat juga dipahami sebagai upaya untuk mengetahui seberapa jauh usaha pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sosial. Barometer sosial merupakan turunan dari konsep *social justice* (keadilan sosial) yang dikemukakan oleh Wolfgang Merkel (2001). Konsep keadilan sosial secara umum diartikan sebagai perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara. Keadilan sosial adalah elemen konstitutif pusat legitimasi dan stabilitas dari setiap komunitas politik. Pada intinya, konsep keadilan sosial didasari oleh postulat bahwa setiap individu harus diberdayakan untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri, dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang luas. Latar belakang sosial tertentu, seperti keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau ketidaksamaan titik awal tidak seharusnya mempengaruhi secara negatif rencana kehidupan pribadi.

Keadilan sosial memiliki enam dimensi, yaitu pencegahan kemiskinan; akses pendidikan; inklusi pasar tenaga kerja; kohesi sosial dan non-diskriminasi; kesehatan; dan keadilan antargenerasi. Konsep keadilan ini menekankan penjaminan setiap kesempatan individu yang benar-benar sama untuk realisasi diri melalui investasi yang ditargetkan dalam pengembangan kapabilitas individu. Hal yang disasar bukan penyetaraan keadilan distributif atau hanya kesetaraan kesempatan hidup formal dengan aturan main dan kode prosedur yang diterapkan sama, namun keadilan sosial dapat dipahami sebagai kerangka aturan dan pedoman bagi masyarakat partisipatif yang mengaktifkan dan memberdayakan anggotanya.

Konsep barometer sosial berfokus pada karakteristik dan usaha-usaha menegakkan keadilan sosial serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara operasional, pemahaman mengenai barometer sosial dilakukan dengan mencermati

program-program sosial pemerintah, usaha departemen terkait dan partai dalam penegakan keadilan sosial di Indonesia. Operasionalisasi barometer sosial mengikuti dimensi keadilan sosial. Barometer sosial diperoleh melalui pencermatan terhadap pencapaian keadilan sosial melalui program sosial, faktor yang memiliki peran dalam keberhasilan program, serta *stakeholder* dari keadilan sosial.

Pengukuran Barometer Sosial dilakukan melalui metode survei dengan kuesioner. Dalam survei ini, digunakan alat ukur Barometer Sosial yang mengukur penilaian warga mengenai program sosial. Warga diminta untuk menilai program-program sosial baik program nasional maupun program yang diselenggarakan oleh beberapa kementerian dan pemerintah daerah di Indonesia. Evaluasi dari sudut pandang warga ini dilakukan untuk mengatasi dan memperkecil kemungkinan bias rezim yang muncul dalam evaluasi dan laporan pemerintah.

Pengukuran Indeks Barometer Sosial merupakan bagian dari tugas INFID sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki mandat memantau pembangunan, dan berdasarkan hasil pemantauan tersebut, berupaya untuk mengubah kebijakan dan program pembangunan agar menjadi lebih inklusif, bermanfaat, imparial, dan tidak diskriminatif. Dalam menjalankan mandatnya, INFID menaruh perhatian besar terhadap kemiskinan, ketimpangan penghasilan dan belum adanya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Pengukuran yang dilakukan kali ini merupakan usaha untuk melengkapi bentuk pemantauan pembangunan Indonesia yang selama ini sudah dilakukan INFID.

INFID telah melakukan berbagai bentuk pemantauan pembangunan melalui penelitian dan kajian, baik kajian dokumen maupun penelitian lapangan yang penting dan bermanfaat. Pengukuran ini diharapkan pemantauan INFID memiliki daya pengaruh yang lebih luas, dan dipublikasikan kepada khalayak oleh media massa dan menjadi perhatian publik. Dengan dasar itu, pengukuran Barometer Sosial dan Ketimpangan Sosial dilakukan oleh INFID secara rutin.

Tujuan pengukuran Barometer Sosial dan Ketimpangan Sosial 2016

- Menghasilkan alat advokasi pembangunan yang kuat dan secara bersama melibatkan partisipasi anggota INFID di berbagai kota di Indonesia

- Menghasilkan laporan pemantauan pembangunan yang reguler dan mudah dimengerti dan dipahami oleh publik, media massa, dan pengambil kebijakan.
- Menyediakan *feedback* dan evaluasi mengenai kinerja dan capaian kebijakan program sosial bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah mengenai kinerja serta capaian program sosial.

Hasil yang ditargetkan riset ini adalah laporan survei yang disebut sebagai Barometer Sosial INFID 2016: Penilaian Program Sosial oleh Warga. Dengan pengukuran ini pemantauan pembangunan yang secara metodologis kuat dan bertanggung jawab dapat dilakukan. Sebelumnya INFID telah melansir Barometer Sosial 2014 dan 2015. Diharapkan hasil Barometer Sosial 2016 pun diliput banyak media massa Indonesia dan menjadi perhatian pengambil kebijakan.

BAB 2

KEBUTUHAN PROGRAM SOSIAL

Di akhir tahun 2014 Indonesia, Indonesia berganti presiden, berganti orang-orang di pemerintahan. Apakah di tahun 2015 ada perubahan dalam kebijakan program sosial? Tampaknya tidak. Program sosial yang dijalankan pemerintah tetap, hanya pelaksanaannya diupayakan agar lebih baik, lebih tepat sasaran dan berhasil-guna.

Dilihat dari jenis program sosial yang diluncurkan pemerintah, belum tampak adanya analisis kebutuhan program sosial secara umum untuk menentukan program apa yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Belum ada juga analisis kebutuhan yang dilakukan di sektor-sektor khusus, seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, dan perdagangan, serta untuk menentukan jenis bantuan apa yang sebaiknya diberikan, apakah bantuan yang berorientasi pada penguatan orang atau pemberian barang, atau apakah bantuan kepada komunitas atau kepada orang per orang.

Perbaikan yang dilakukan tampak pada pembuatan standar pelaksanaan program sosial, mencakup di antaranya prosedur operasional; durasi; frekuensi; besaran bantuan; proses pemberian bantuan; target penerima bantuan; pelaksana program; serta aktivitas pemantauan dan evaluasi. Standar tersebut diupayakan berlaku di setiap kementerian terkait program sosial, provinsi, dan kabupaten/kota.

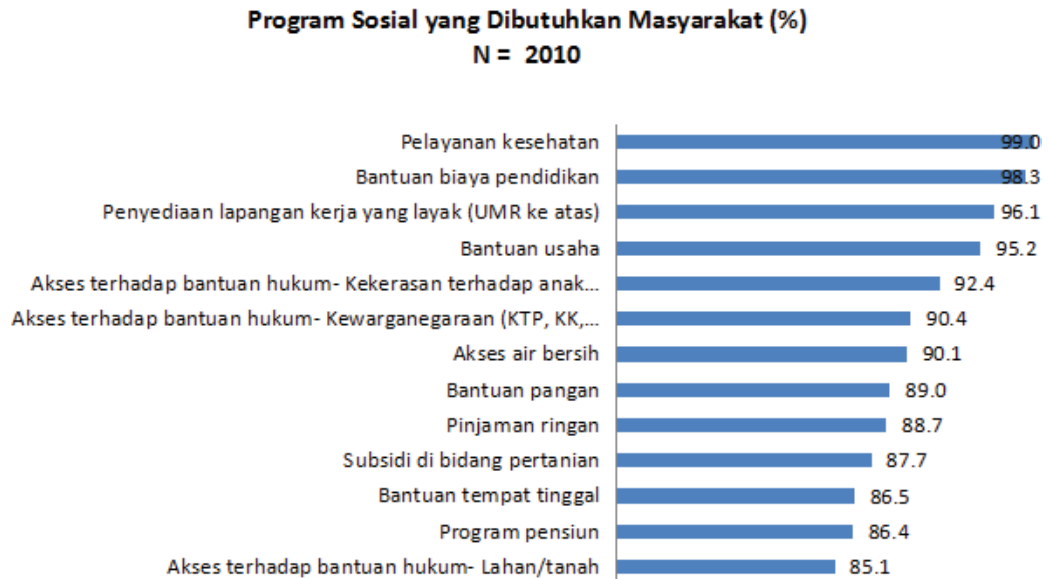
Bagaimana warga menilai usaha pemerintah meningkatkan kualitas program sosial? Sejauh mana kebutuhan warga akan program sosial terpenuhi? Survei Barometer Sosial 2016 yang mengukur persepsi warga terhadap pelaksanaan program sosial tahun 2015 mencoba menjawab pertanyaan ini.

2.1. Kebutuhan Program Sosial

Secara umum, kebutuhan terhadap program sosial di Indonesia hingga 2016 tergolong tinggi. Tak jauh berbeda dibandingkan 2015, warga masih membutuhkan

program sosial terutama di bidang pelayanan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, penyediaan pekerjaan, bantuan usaha, pinjaman ringan, subsidi pertanian, dan program pensiun. Grafik berikut ini memperlihatkan persentase kebutuhan akan bantuan masyarakat.

Grafik 1. Jenis Bantuan yang Sesuai dan Dibutuhkan Masyarakat



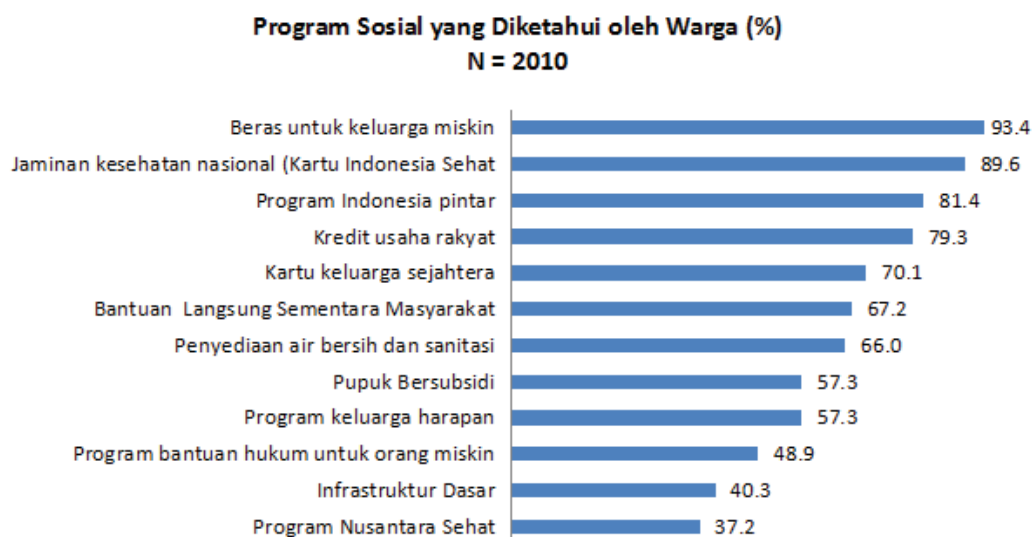
Berdasarkan grafik 1, tidak terdapat perubahan persentase yang signifikan pada kebutuhan yang sama dengan temuan pada tahun 2015, namun tipe kebutuhan warga meningkat dari tahun sebelumnya, seperti adanya kebutuhan mengenai akses terhadap bantuan hukum untuk kasus kekerasan terhadap anak serta perempuan, perihal kewarganegaraan (KTP, KK, dsb.), serta perihal sengketa tanah. Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan akses air bersih, bantuan tempat tinggal, dan bantuan pangan.

Temuan tahun 2016 mengindikasikan bahwa kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul ini juga memiliki urgensi yang cukup tinggi bila dilihat dari persentasenya, bahkan lebih besar dibandingkan dengan beberapa kebutuhan yang juga muncul di tahun 2015. Kebutuhan yang besar akan program sosial itu mengindikasikan masih belum memadainya sumber daya dan sarana pemenuh kebutuhan itu sehingga warga masih sangat membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah melalui

program sosial. Beberapa kebutuhan juga belum ada program sosial yang secara khusus mengurus kebutuhan tersebut. Sementara itu, bantuan-bantuan yang dibutuhkan, yang coba dipenuhi oleh beberapa program sosial, menurut penilaian warga, sebagian besar belum cukup memadai, bahkan sepertiga responden menganggap program sosial di Indonesia tidak memadai. Jika kebutuhan yang besar itu tak dapat terpenuhi, maka akan ada deprivasi pada warga yang mengalaminya.

Pada kenyataannya, tidak semua kebutuhan itu diupayakan pemenuhannya melalui program sosial. Pemerintah baru menjalankan program sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pemberian beras, jaminan kesehatan dan pembiayaan pendidikan, ditambah bantuan hukum dan pengadaan infrastruktur dasar. Walau demikian, tidak semua program sosial yang diselenggarakan pemerintah diketahui keberadaannya oleh warga. Keberadaan program sosial yang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan dasar diketahui kebanyakan warga, tetapi sebagian besar program lainnya belum diketahui. Grafik 2 menggambarkan persentase warga yang mengetahui program sosial yang diselenggarakan pemerintah.

Grafik 2. Program Sosial yang Diketahui oleh Warga



Terdapat diskrepansi antara program sosial yang diselenggarakan pemerintah dengan program sosial yang diketahui warga. Program pelayanan kesehatan, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan usaha sudah diketahui oleh kebanyakan

warga. Mereka dapat mengenali program khusus apa saja yang menysasar kebutuhan itu. Program bantuan hukum, infrastruktur dasar, Program Nusantara Sehat yang diselenggarakan pemerintah belum diketahui kebanyakan warga.

2.2. Belum Adanya Program Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Lapangan Kerja

Satu hal yang menonjol dalam pengukuran Indeks Barometer Sosial 2016 yang dilakukan INFID adalah belum adanya program sosial yang memenuhi kebutuhan akan pekerjaan. Padahal menurut warga, mereka membutuhkan penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah. Sebesar 96,1 responden survei ini menyatakan butuh kerja yang layak dengan upah minimum regional.

Hasil ini memberikan informasi penting mengenai perlunya diselenggarakan program sosial yang membantu warga untuk mendapatkan pekerjaan. Program sosial terkait pekerjaan yang dibutuhkan mencakup bantuan pendidikan dan pelatihan kerja baik bagi orang-orang yang memerlukan peningkatan keahlian, maupun mereka yang perlu memiliki keahlian baru guna memenuhi persyaratan kerja. Tanpa keahlian kerja yang memadai dan sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sulit, bahkan tidak mungkin warga dapat bekerja baik dan mendapatkan penghasilan layak. Program sosial dalam ranah pekerjaan memerlukan baik pengadaan lapangan pekerjaan maupun perolehan dan peningkatan keahlian pada para warga yang membutuhkannya. Pengadaan program sosial di ranah pekerjaan ini perlu menjadi perhatian penting pemerintah untuk tahun-tahun mendatang. Pengadaan program sosial yang membantu warga mendapatkan pekerjaan perlu segera diadakan.

Bab 3

Penilaian Warga Terhadap Program Sosial

3.1. Penilaian Warga Mengenai Program Sosial Nasional

Bagaimana penilaian warga mengenai kinerja program sosial nasional, mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN; Kartu Indonesia Sehat; Kementerian Kesehatan), Program Keluarga Harapan (PKH; Kementerian Sosial), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS; Kementerian Sosial), Program Indonesia Pintar (PIP; Kartu Indonesia Pintar; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Kredit Usaha Rakyat (KUR; kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), dan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN; Kementerian Sosial)? Bagaimana pelaksanaan program-program tersebut?

Tabel 1. Kementerian dan Program Sosial yang Dijalankan

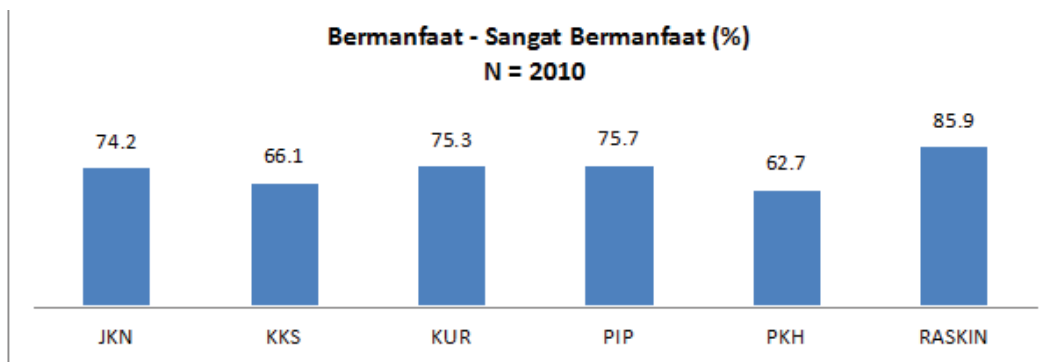
Kementerian	Program Sosial
Kementerian Kesehatan	Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat
Kementerian Sosial	Program Keluarga Harapan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kartu Keluarga Sejahtera
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Indonesia Pintar – Kartu Indonesia Pintar
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kredit Usaha Rakyat

Apakah program-program itu sudah memenuhi kriteria keadilan distribusi yang mencakup manfaat, tepat sasaran, sesuai dengan dan memenuhi kebutuhan, barang/jasa/uang yang diterima sesuai dengan semestinya, adanya akses terhadap bantuan, dan proses yang mudah?

Apakah program-program itu memenuhi kriteria keadilan distribusi yang mencakup adanya aturan yang jelas, transparan, dan melibatkan *stakeholder*, pelaksanaan sesuai aturan, serta informasinya jelas?

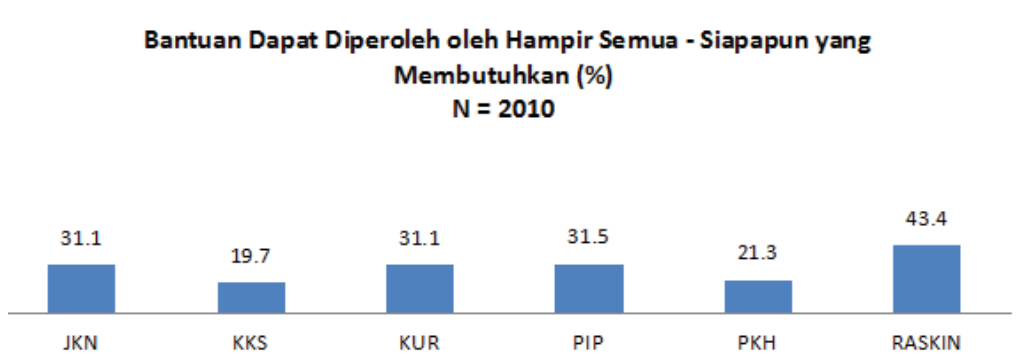
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh warga melalui survei Barometer Sosial. Melalui bentuk grafik jawaban-jawaban warga yang menjadi responden survei, akan dipaparkan dibawah ini.

Grafik 3. Kebermanfaatan Program Sosial yang Diselenggarakan Pemerintah



Secara umum program-program sosial yang diselenggarakan di tahun 2015 dinilai bermanfaat oleh warga. Program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah ini dipersepsikan memberikan manfaat bagi penerimanya dan memang dibutuhkan. Hanya saja menurut persepsi warga masih belum terlalu tepat sasaran, meskipun jika dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat sedikit peningkatan pada beberapa program. Namun tetap saja lebih dari 50% responden menilai bahwa program sosial masih belum tepat sasaran pada warga yang membutuhkan program tersebut.

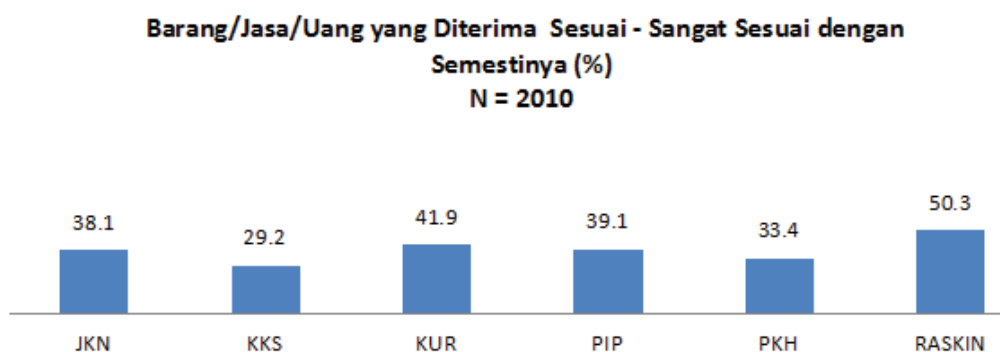
Grafik 4. Ketepatan Sasaran Program Sosial



Selain ketepatan sasaran program, hal lain yang dilihat adalah persepsi mengenai kesesuaian barang, uang, atau jasa yang diterima. Kebanyakan warga menilai bahwa barang/uang/jasa yang mereka terima, belum dengan semestinya. Hal ini

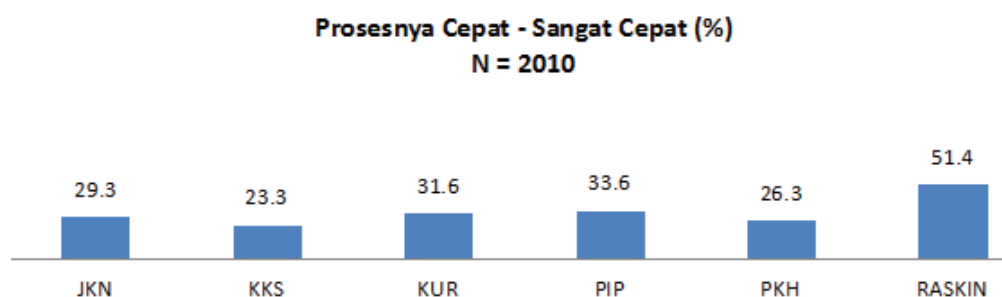
mengindikasikan hanya terdapat sedikit perubahan dari tahun lalu dimana tingkat kesesuaian barang/jasa/uang masih berada di bawah 50%, sama seperti pada tahun ini. Kebijakan program sosial sebaiknya dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara memadai sehingga penentuan jenis bantuan dan kepada siapa bantuan akan diberikan mengalami peningkatan. Walaupun sudah terdapat peningkatan, tidak dapat dibilang kebijakan program sosial sudah berhasil sepenuhnya, masih ada ruang untuk perbaikan dimana persentase-persentase ini dapat mengalami peningkatan di masa depan.

Grafik 5. Kesesuaian Barang/Uang/Jasa yang Diterima



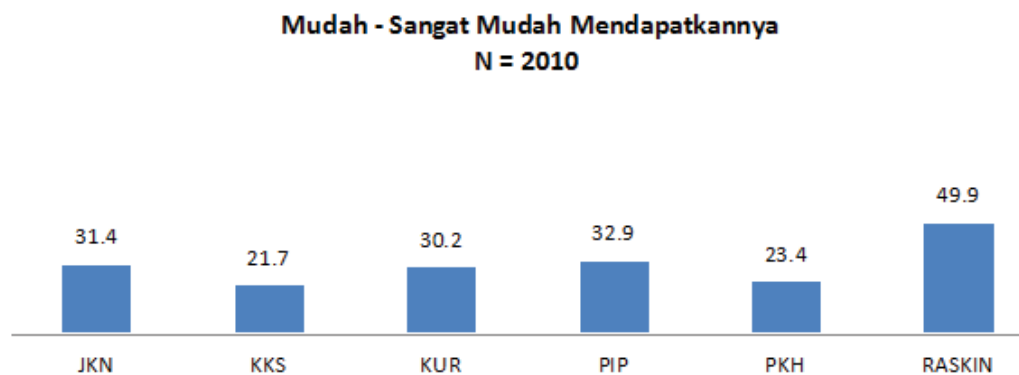
Pada prakteknya, rentetan prosedur yang terlalu panjang dan banyaknya persyaratan yang dibebankan kepada warga masih menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program sosial. Lebih dari 50% warga menilai proses pelaksanaan program sosial lambat. Hasil ini menunjukkan sedikit peningkatan dari temuan Barometer Sosial 2015, dimana sekitar lebih dari 55% responden menilai bahwa proses bantuan sosial lambat atau sangat lambat.

Grafik 6. Kecepatan Proses Program Sosial



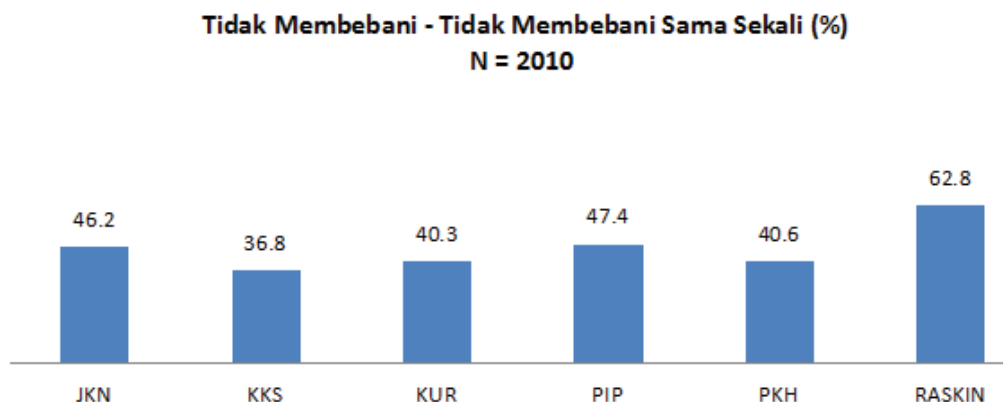
Selain kecepatan, kemudahan mendapatkan bantuan program sosial juga menjadi pertimbangan. Lebih dari 50% responden menilai bahwa program sosial masih cukup sulit untuk didapatkan. Temuan ini mengindikasikan sedikit peningkatan dibandingkan tahun lalu, namun perbedaannya hanya sekitar beberapa persen saja. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa terdapat penurunan yang cukup drastis dari program sosial bertemakan pendidikan serta program sosial kesehatan. Program sosial seharusnya menghindari prosedur yang panjang dan berbelit-belit serta menjaga koherensi data warga yang membutuhkan bantuan dan data yang aktual di masyarakat, sehingga tidak perlu lagi ada warga yang mendaftar ulang dari awal dan mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan.

Grafik 7. Kemudahan Mendapatkan Bantuan Program Sosial



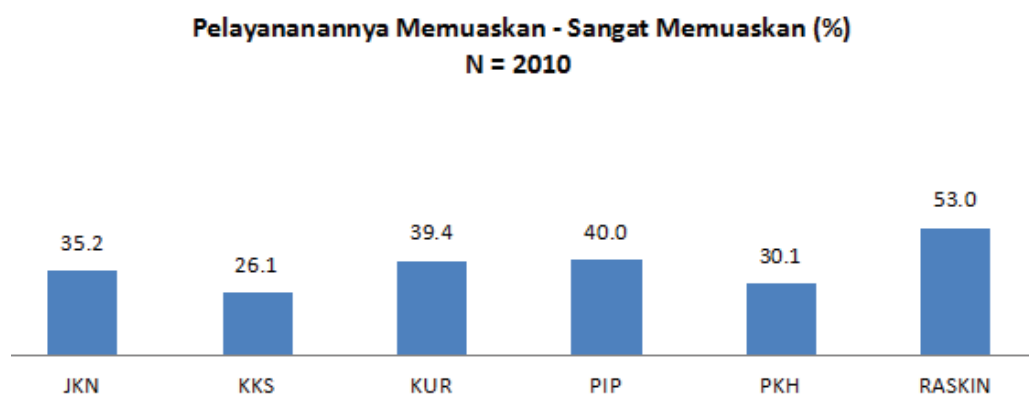
Masih berbicara soal prosedur, kali ini temuan yang disasar adalah mengenai sejauh mana masyarakat menilai program sosial ini membebani.

Grafik 8. Sejauh Mana Program Sosial Membebani



Sebagian besar warga masih menganggap bahwa program sosial pemerintah membebani, dengan persentase dibawah 50%, walaupun ada satu program yang berada diatas titik batas tersebut. Untuk meningkatkan persentase ini, program sosial seharusnya menghindari proses yang berbelit-belit, memakan waktu banyak, rumit, dan bentuk bantuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini perlu dilihat agar warga tidak harus mengeluarkan banyak waktu, biaya, dan tenaga untuk bisa mendapatkan bantuan dari program sosial pemerintah.

Grafik 9. Kepuasan terhadap Pelayanan Program Sosial



Sebagian besar warga menilai pelayanan dalam program sosial masih belum memuaskan. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan program sosial tergolong moderat, walaupun juga rendah pada beberapa program. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan penilaian ini, program sosial sebaiknya tidak diberikan di tempat-tempat yang tidak nyaman untuk didatangi warga pada saat yang bersamaan (ruangan yang sempit atau jarak yang jauh). Selain itu, perlu ada juga pengaturan waktu pemberian bantuan yang efektif, agar warga tidak mengantri lama, berdesak-desakan, atau bahkan merasa tidak mendapatkan kejelasan kapan mereka akan menerima bantuan.

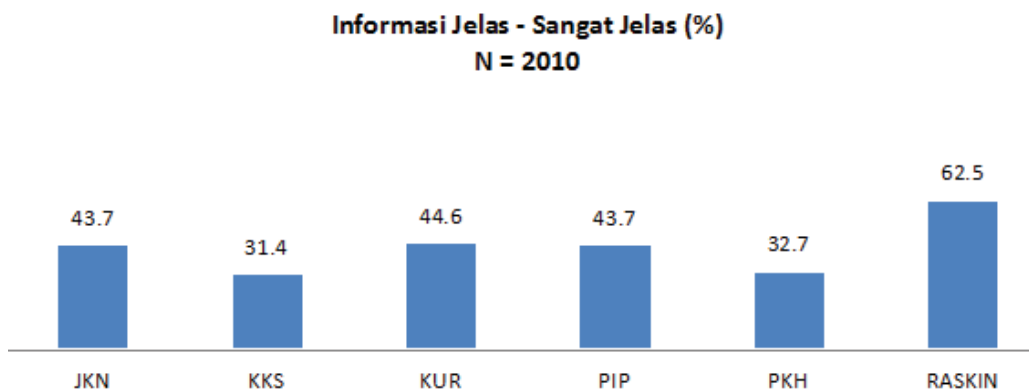
Berdasarkan persepsi warga yang dipaparkan diatas, beberapa kriteria keadilan sosial mengalami penurunan dan juga peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski program sosial yang diselenggarakan pemerintah dinilai bermanfaat, namun belum semua masyarakat yang ditarget program mendapatkannya. Program sosial yang dijalankan belum sesuai sepenuhnya dengan

kebutuhan dan belum dapat memenuhi kebutuhan warga. Akses terhadap bantuan pun masih cukup sulit untuk diperoleh warga. Meskipun beberapa dari mereka sudah mendapatkan akses, mereka masih kesulitan dan merasa terbebani untuk menjalankan prosedur tersebut yang hasilnya juga masih belum cukup memuaskan bagi masyarakat.

Untuk kriteria keadilan prosedural, melalui survei ini digali persepsi warga tentang kejelasan informasi mengenai program sosial dan kesesuaian pelaksanaan program sosial dengan aturan yang sudah ditentukan. Kejelasan informasi mencakup informasi mengenai tujuan, sasaran, persyaratan, prosedur, dan waktu pelaksanaan program sosial. Kesesuaian pelaksanaan dengan aturan mencakup kesesuaian prosedur, proses, standar pelayanan, pelaksana, serta jenis dan besar bantuan yang ada pada pelaksanaan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.

Informasi mengenai keberadaan program sosial masih dinilai tidak jelas oleh warga. Persentase responden yang menilai informasi program sosial jelas atau sangat jelas masih rendah, rata-rata berada dibawah 50%, walaupun terdapat satu program yang berada diatas titik tersebut.

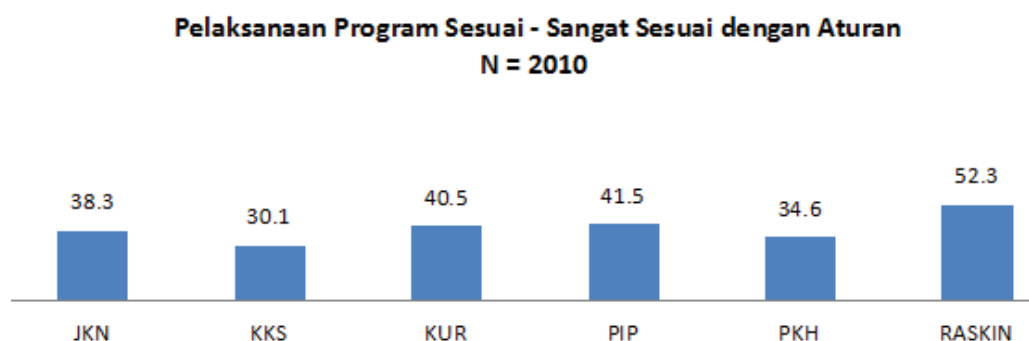
Grafik 10. Kejelasan Informasi Program Sosial



Kejelasan mengenai informasi program sosial juga mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai program sosial pemerintah tersebut. Berdasarkan survei, kebanyakan warga menilai pelaksanaan program sosial masih tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Menurut warga, masih banyak

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program sosial. Kesesuaian antara prosedur, proses standar pelayanan, pelaksana, serta jenis dan besar bantuan yang ada pada pelaksanaan masih belum sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Disonansi ini juga bisa terjadi karena tidak lengkapnya informasi yang diterima warga sehingga mereka menggunakan pengetahuan yang mereka ketahui pada saat itu sebagai dasar penilaian dari persepsi yang mereka utarakan dalam survei ini.

Grafik 11. Kesesuaian Program Sosial dengan Aturan



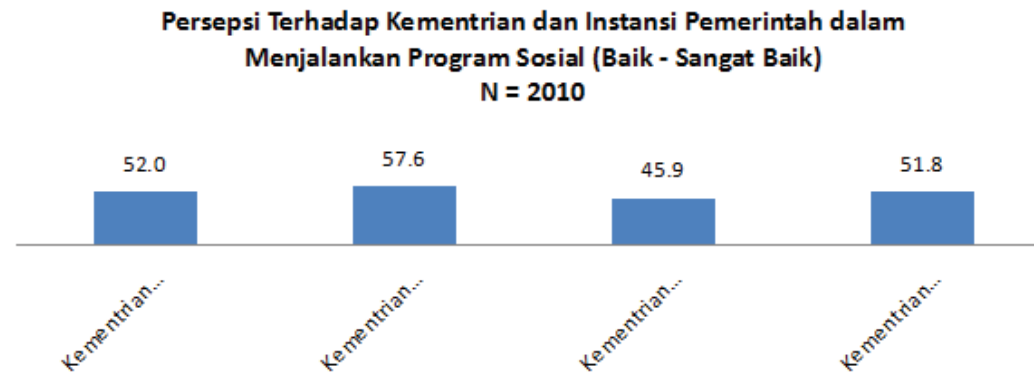
3.2. Penilaian Warga Mengenai Program Sosial yang Diselenggarakan oleh Kementerian

Bagaimana kementerian yang terkait dengan program sosial mengupayakan pencapaian keadilan sosial melalui program-program sosial yang mereka canangkan? Bagaimana jalannya serta pelaksanaan program tersebut? Survei ini juga menjawab pertanyaan mengenai upaya kementerian tersebut. Mirip dengan Barometer Sosial 2015, kementerian yang program sosialnya dinilai disini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.

Grafik-grafik berikut ini akan memberikan paparan penilaian warga mengenai kinerja program sosial yang diselenggarakan kementerian tersebut.

“Bagaimana kualitas program sosial yang dijalankan oleh kementerian dan instansi pemerintah?”

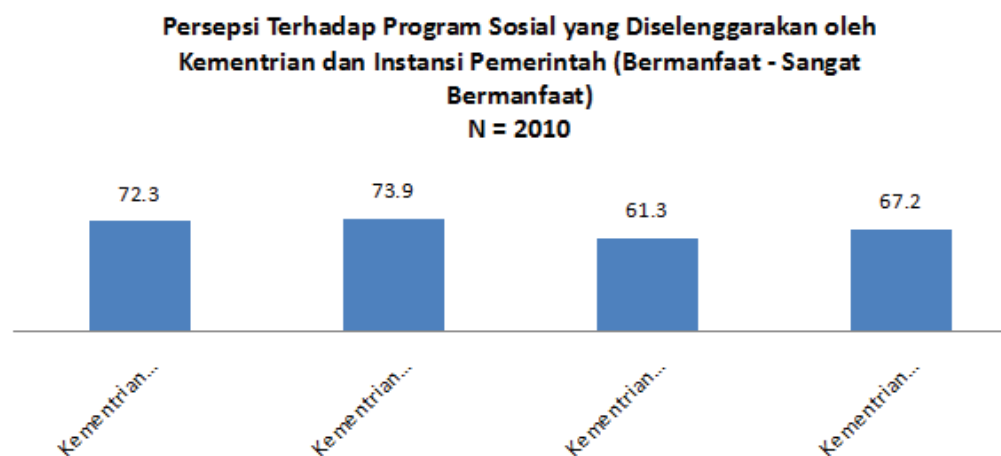
Grafik 12. Kualitas Program Sosial oleh Kementerian



Kualitas penyelenggaraan program sosial oleh kementerian dirasakan sudah baik atau sangat baik oleh sekitar 50% warga. Secara umum, terdapat penurunan persentase dari persepsi warga terhadap kementerian-kementerian terkait jalannya program sosial dalam unsur kualitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persepsi warga terhadap Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun pada kedua kementerian lainnya, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat perubahan yang cukup signifikan, terdapat penurunan sekitar 12% dibandingkan dengan tahun lalu.

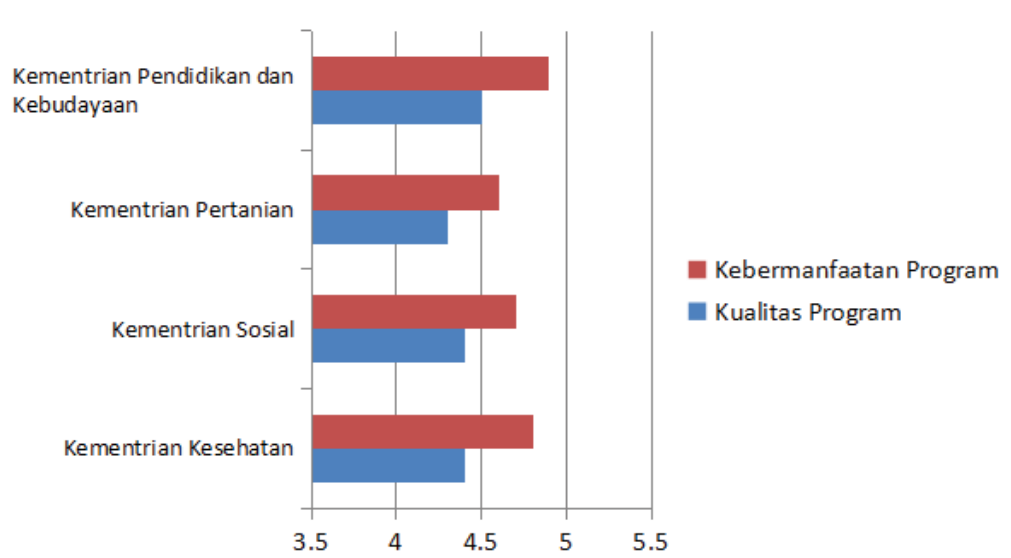
“Sejauh mana program sosial dari kementerian dan instansi pemerintah berikut ini bermanfaat?”

Grafik 13. Kebermanfaatan Program Sosial oleh Kementerian



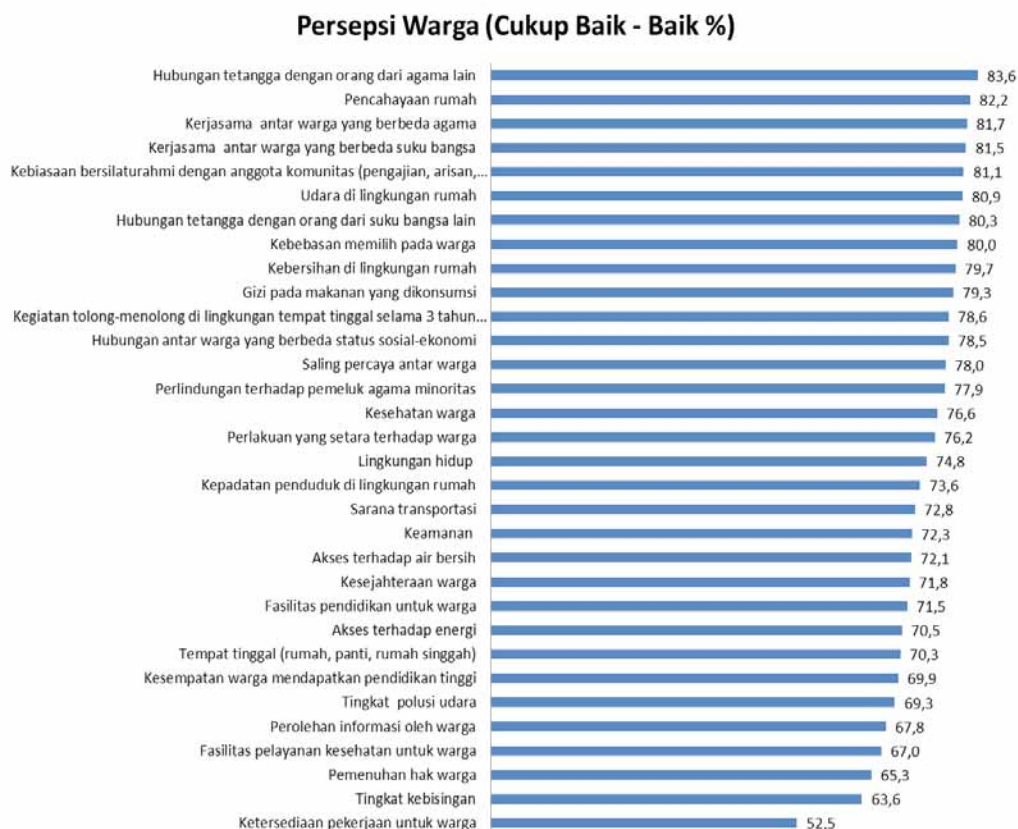
Secara umum program sosial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dinilai bermanfaat oleh kebanyakan warga. Grafik 14 memaparkan jawaban “bermanfaat atau sangat bermanfaat” oleh responden atas pertanyaan tersebut. Bila dibandingkan dengan Barometer Sosial 2015, tidak ada perubahan yang cukup signifikan pada persepsi terhadap program sosial yang diselenggarakan kementerian dan instansi pemerintah, hanya terdapat penurunan sekitar 2-5% pada ketiga kementerian, kecuali Kementerian Pertanian, yang mengalami kenaikan sebesar 3,6%.

Grafik 14. Rata-Rata Skor Persepsi tentang Program Sosial dari Kementerian



Rata-rata skor yang didapatkan dari survei ini mengenai kualitas dan kebermanfaatan program jatuh pada titik potong 4 jika dibulatkan. Hal ini secara umum menggambarkan persepsi pada masyarakat bahwa mereka menganggap kualitas serta kebermanfaatan dari program sosial pemerintah berada pada titik agak bermanfaat dan agak baik kualitasnya.

Grafik 15. Persepsi Warga Mengenai Lingkungan Tempat Tinggal



Untuk melihat aspek ketimpangan karena proses dengan sub-aspek lingkungan, responden diminta menilai infrastruktur serta keadaan yang ada di lingkungan mereka. Secara umum, aspek lingkungan dinilai sudah baik oleh masyarakat, dilihat dari kepuasan mereka terhadap beberapa hal yang ada di lingkungan mereka. Namun, jika kita lihat dari lima hal terbawah (ketersediaan pekerjaan, tingkat kebisingan, pemenuhan hak warga, fasilitas pelayanan kesehatan, dan perolehan informasi), hal-hal yang dirasa belum cukup baik merupakan hal-hal yang nyatanya krusial bagi warga. Upaya memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang oleh warga ini akan terjadi peningkatan kepuasan warga terhadap lingkungannya yang akan berimplikasi pada kehidupan yang lebih baik bagi warga Indonesia.

BAB 4

INDEKS BAROMETER SOSIAL

4.1. Indeks Barometer Sosial Nasional

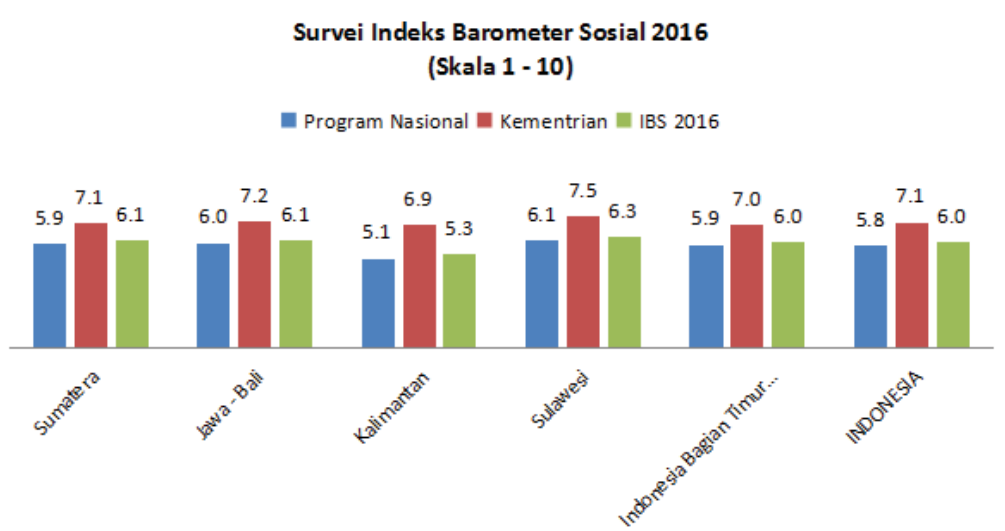
Seberapa jauh usaha pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi dalam upayanya mencapai keadilan sosial melalui program-program sosial pada 2015? Bagaimana jika dibandingkan 2014?

Terdapat beberapa perubahan pada perhitungan Indeks Barometer Sosial 2016, yaitu menghilangkan indikator kinerja pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Dikarenakan terdapat perubahan, yang dapat diperbandingkan langsung hanya dimensi Program Nasional. Dua dimensi yang digunakan dalam Indeks Barometer Sosial 2016 adalah program nasional dan kinerja kementerian dengan perhitungan yang baru. Untuk menyesuaikan nilai pada IBS 2014 dan IBS 2015, dilakukan kalkulasi ulang dengan menggunakan rumus IBS 2016.

Secara keseluruhan, hasil Indeks Barometer Sosial 2016 adalah 6 (skala 1-10), lebih tinggi dibandingkan Indeks Barometer Sosial 2015 yang sebesar 5,6.

Grafik 16. Skor IBS 2016 Nasional dan Perbandingannya dengan Provinsi*

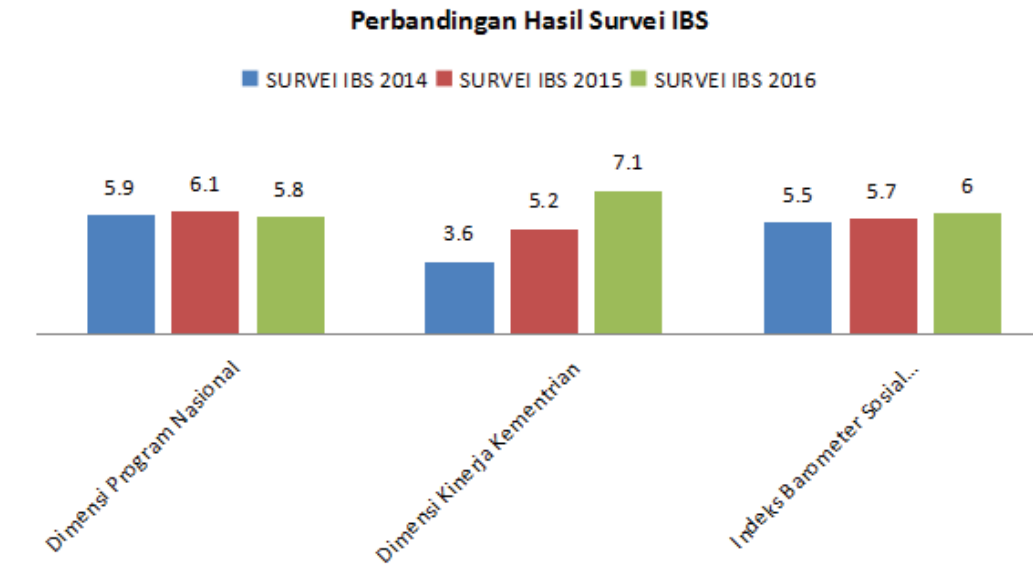
*Perhitungan menggunakan rumus Survei IBS 2016



Secara umum, penilaian mengenai program nasional, kementerian, serta IBS 2016 tidak terlalu jauh berbeda antara daerah dengan nasional. Pada penilaian program nasional di Kalimantan lebih rendah dibandingkan dengan skala nasional.

Grafik 17. Perbandingan Hasil Survei IBS Tiga Tahun Terakhir*

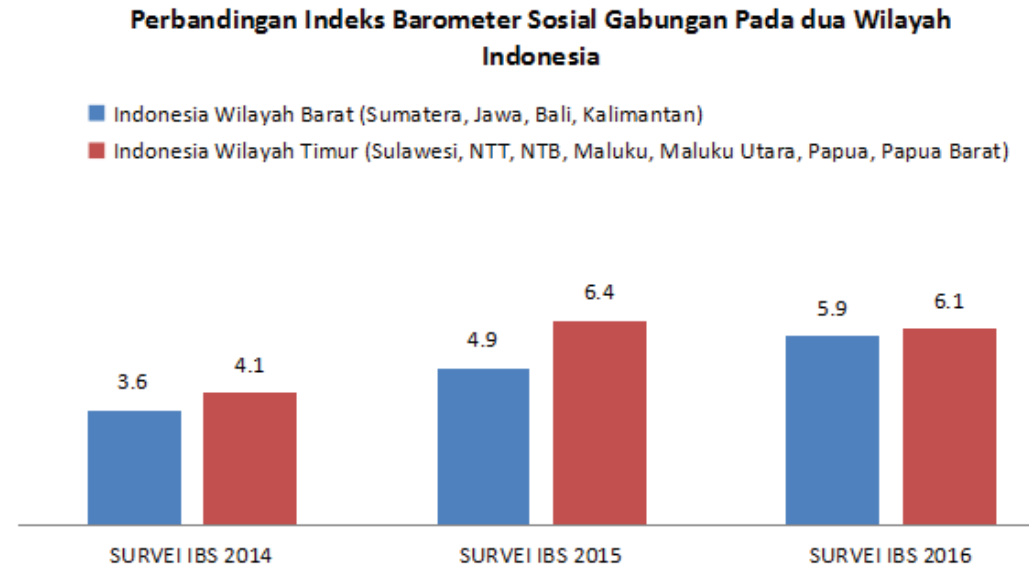
**Perhitungan menggunakan rumus Survei IBS 2016*



Bila hasil survei IBS dibandingkan dalam tiga tahun terakhir, terjadi sedikit penurunan pada dimensi program nasional, namun terdapat peningkatan yang signifikan pada dimensi kerja kementerian dan Indeks Barometer Sosial Gabungan. Hal ini mengindikasikan perkembangan pada pemerintahan Indonesia dalam upayanya untuk mencapai keadilan sosial. Beberapa program sosial sudah dijalankan, namun warga menilai pelaksanaan program tersebut belum optimal, masih ada ruang untuk perkembangan. Namun, dalam dimensi kinerja kementerian, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, sehingga kinerja dan peran kementerian dinilai warga cukup signifikan dalam mencapai keadilan sosial.

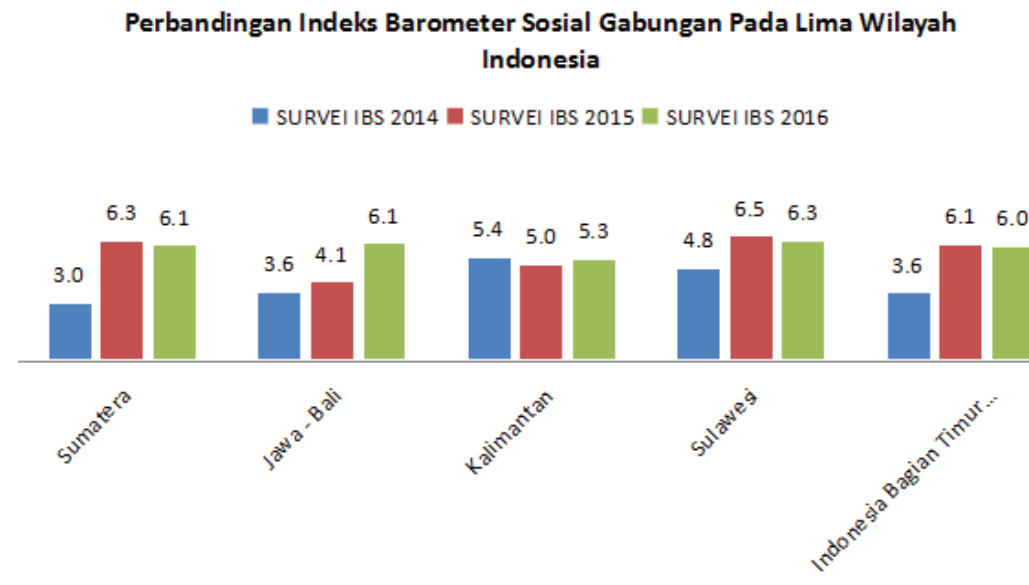
Grafik 18. Perbandingan IBS Gabungan pada Dua Wilayah Indonesia*

*Perhitungan menggunakan rumus Survei IBS 2016



Grafik 19. Perbandingan IBS Gabungan pada Lima Wilayah Indonesia*

*Perhitungan menggunakan rumus Survei IBS 2016

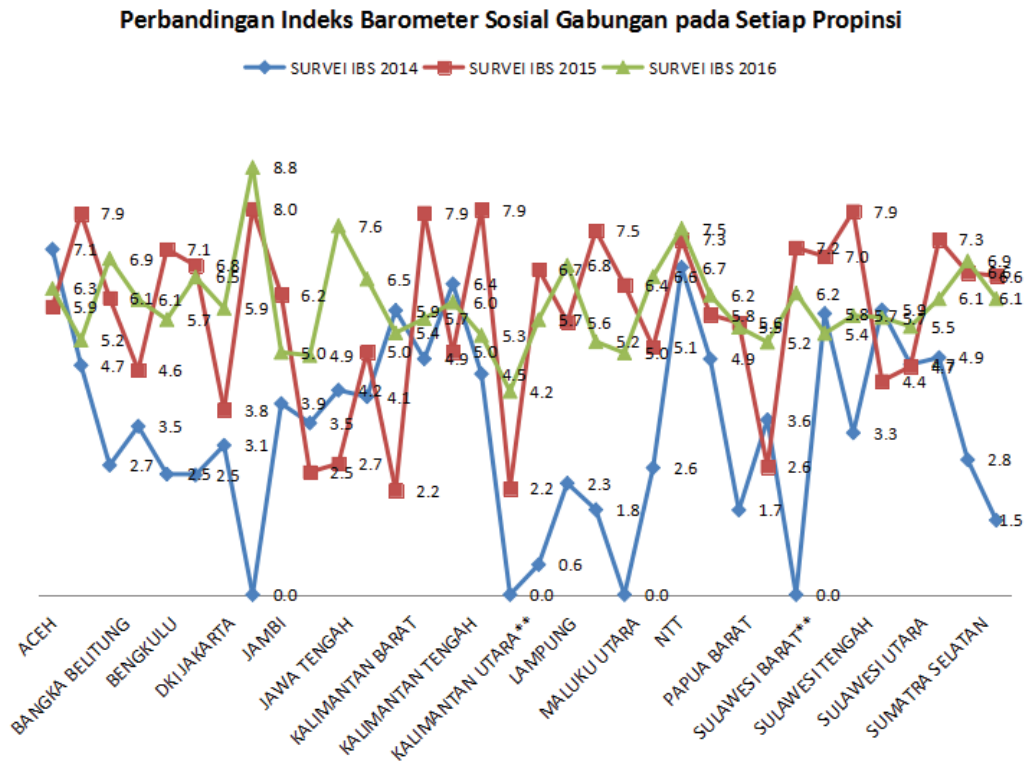


Secara umum, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Barometer Sosial pada tiga tahun terakhir jika kita melihat dari pembagian wilayah Indonesia menjadi dua ataupun lima. Jika melihat dari setiap provinsi, dapat dikatakan bahwa deviasi antarprovinsi tidak terlalu jauh pada Indeks Barometer Sosial 2016, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kestabilan dan keadilan sosial dengan meminimalisasi ketimpangan-ketimpangan yang ada di setiap provinsi.

Grafik 20. Perbandingan IBS Gabungan pada Setiap Provinsi*

*Perhitungan menggunakan rumus Survei IBS 2016

**Provinsi tidak termasuk dalam Survei IBS 2014



Bab 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

- Kebutuhan warga akan program sosial hingga tahun 2016 masih tergolong tinggi. Warga membutuhkan bantuan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan bantuan usaha.
- Masih ada program sosial yang belum diketahui oleh banyak warga. Hal ini menyebabkan banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial itu tidak mendapatkannya.
- Program sosial di ranah pekerjaan belum diselenggarakan oleh pemerintah padahal menurut warga kebutuhannya sangat tinggi.
- Program-program sosial dinilai bermanfaat oleh masyarakat, namun masih belum tepat sasaran. Barang/jasa/uang yang diterima juga masih belum sesuai dengan semestinya. Terlebih lagi, proses dari program sosial masih belum cepat dan terkesan berbelit-belit serta warga masih kesulitan mendapatkan bantuan dari program sosial. Program sosial menjadi terasa membebani bagi warga.
- Hasil Indeks Barometer Sosial 2016 menunjukkan bahwa dalam penilaian warga ada peningkatan kualitas program sosial secara keseluruhan pada tahun 2015 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Indeks Barometer 2016 adalah 6 yang artinya pemerintah dinilai oleh warga agak mengupayakan pencapaian keadilan sosial.
- Kinerja kementerian dalam mengupayakan pencapaian keadilan sosial dinilai warga meningkat, dari 5,2 menjadi 7. Berbeda dibandingkan dua tahun sebelum, pada tahun 2015 kementerian terkait dengan program sosial dinilai jauh lebih sungguh-sungguh menjalankan program sosial.

5.2. Rekomendasi

Diperlukan program sosial di ranah pekerjaan sebab dalam penilaian warga kebutuhan tersedianya pekerjaan dengan penghasilan yang layak sangat tinggi. Program sosial terkait pekerjaan yang dibutuhkan mencakup bantuan pendidikan dan pelatihan kerja baik bagi orang-orang yang memerlukan peningkatan keahlian, maupun mereka yang perlu memiliki keahlian baru guna memenuhi persyaratan kerja. Pengadaan program sosial di ranah pekerjaan ini perlu menjadi perhatian penting pemerintah untuk tahun-tahun mendatang.

Program sosial seharusnya menghindari prosedur yang panjang dan berbelit-belit serta menjaga koherensi data warga yang membutuhkan bantuan dan data aktual di masyarakat, sehingga tidak perlu lagi ada warga yang mendaftar ulang dari awal dan mengalami kesulitan guna memperoleh bantuan.

Masih perlu diupayakan adanya standar pelaksanaan program sosial, mencakup di antaranya prosedur operasional; durasi; frekuensi; besaran bantuan; proses pemberian bantuan; target penerima bantuan; pelaksana program; serta aktivitas pemantauan dan evaluasi. Audit independen dari pihak diluar pemerintah untuk mengevaluasi dan menghasilkan usulan perbaikan pelaksanaan program sosial juga perlu.

Masih seperti tahun 2015, masalah birokrasi dan *mindset* dari pelaksana program sosial masih belum sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai keadilan sosial. Agar usaha pemberdayaan warga di Indonesia untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri, dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang luas diperlukan revolusi birokrasi. Upaya itu membutuhkan perubahan kerangka pikir, *mindset*, bahkan paradigma yang mendasari pemerintahan dan birokrasi.

Daftar Pustaka

- Han, C., Janmaat, J.G., Hoskins, B. and Green, A. (2012) Perceptions of Inequalities: implications for social cohesion, published by the Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies at: <http://www.llakes.org>
- Keller, T., Medgyesi, M., & Tóth, I.G. (2010) *Analysing the link between measured and perceived income inequality in European countries*. European Commission; Directorate-General "Employment, Social Affairs and Equal Opportunities" Unit E1 - Social and Demographic Analysis.
- Kelley, J. & Evans, M.D.R. (1993) "The Legitimation of Inequality: Attitudes Towards Inequality in Nine Nations." *American Journal of Sociology* 99 (July): 75-125.
- Luebker, M. (2004) 'Globalization and perceptions of social inequality', Working Paper No. 32. International Labour Office, Geneva. Online: <http://www.rrojasdatabank.info/inequality/SSRN-id655762.pdf>, accessed 14 Jan 2011.
- Merkel, Wolfgang (2001): The Third Ways of Social Democracy, in: Cuperus, Rene/Duffek, Karl/Kandell, Johannes (Eds.): *European Social Democracy Facing the Twin Revolution of Globalisation and the Knowledge Society*, Amsterdam/Berlin/Vienna: 27-62
- Niehues, J. (2014) "Subjective Perceptions of Inequality and Redistributive Preferences: An International Comparison". Cologne Institute for Economic Research (IW), Konrad-Adenauer-Ufer 21, Cologne, Germany, niehues@iwkoeln.de and IZA Bonn
- Osberg, L. and Smeeding, T. (2006) "'Fair' Inequality? Attitudes towards Pay Differentials: The United States in Comparative Perspective', *American Sociological Review*, 71, pp. 450-473.
- Turner, Bryan (1986) *Equality*. Chichester, and Tavistock, London: Ellis Horwood.

Kerangka Teoretik dan Metodologi

1. Barometer Sosial Sebagai Turunan Konsep Keadilan Sosial

Barometer Sosial merupakan turunan dari konsep *social justice* (keadilan sosial) yang dikemukakan oleh Wolfgang Merkel. Konsep keadilan sosial secara umum diartikan sebagai Perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara. “Keadilan sosial” adalah elemen konstitutif pusat legitimasi dan stabilitas dari setiap komunitas politik. Pada intinya konsep keadilan sosial didasari oleh postulat bahwa setiap individu harus diberdayakan untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri, dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang luas. Latar belakang sosial tertentu, seperti keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau ketidaksamaan titik awal, tidak diizinkan mempengaruhi secara negatif rencana kehidupan pribadi.

Dimensi Keadilan Sosial adalah sebagai berikut.

- Pencegahan kemiskinan (*Poverty prevention*)
- Akses terhadap pendidikan (*Access to education*)
- Inklusi pasar tenaga kerja (*Labor market inclusion*)
- Kohesi sosial dan non-diskriminasi (*Social cohesion and non-discrimination*)
- Kesehatan (*Health*)
- Keadilan antar-generasi (*Intergenerational justice*).

Konsep keadilan ini peduli dengan penjaminan setiap kesempatan individu yang benar-benar sama untuk realisasi diri melalui investasi yang ditargetkan dalam pengembangan “kapabilitas” individu. Yang dikejar bukan “penyetaraan” keadilan distributif atau hanya kesetaraan kesempatan hidup formal dengan aturan main dan kode prosedur yang diterapkan sama. Keadilan sosial dapat dipahami sebagai kerangka aturan dan pedoman bagi masyarakat partisipatif yang mengaktifkan dan memberdayakan anggotanya. Penerapannya mensyaratkan negara kuat dipimpin oleh aktor yang mengerti kebutuhan akan kesetaraan sosial sebagai alat memastikan kesempatan partisipasi.

Konsep barometer sosial berfokus pada karakteristik dan usaha-usaha menegakkan keadilan sosial serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara operasional, pemahaman mengenai barometer sosial dilakukan dengan mencermati program-program sosial pemerintah, usaha departemen terkait dan partai dalam penegakan keadilan sosial di Indonesia.

Operasionalisasi barometer sosial mengikut dimensi keadilan sosial. Barometer sosial diperoleh melalui pencermatan terhadap pencapaian keadilan sosial melalui program sosial, faktor yang berperan dalam keberhasilan program, serta *stakeholder* keadilan sosial mencakup warga negara, pemerintah, partai politik, CSO (*civil society organization*).

2. Pendekatan Metodologis

Secara umum, survei ini akan mengadopsi perspektif keadilan sosial sebagaimana disusun dalam Indeks Keadilan Sosial yang disusun oleh Wolfgang Merkel/*Bertllemann Stiftung*. Tetapi *software* itu disadur dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan metode survei. Metode tersebut, antara lain mengukur dan menilai kebijakan mengatasi kemiskinan; ketimpangan; kinerja pelayanan kesehatan; pasar kerja; dan sebagainya.

3. Waktu Pelaksanaan

Pengukuran dilaksanakan selama tiga bulan dengan perincian satu bulan persiapan; satu bulan pengambilan data lapangan; dan satu bulan untuk pengolahan data serta pembuatan laporan.

4. Permasalahan

Empat pertanyaan mengenai program sosial yang diajukan adalah sebagai berikut.

- Kebijakan-Program sosial apa yang dianggap *penting dan bermanfaat* bagi warga negara?
- Kementerian dan lembaga pemerintah mana yang memiliki *kinerja baik* dalam penyelenggaraan dan penyajian kebijakan-program sosial?

- *Kebijakan-program sosial apa yang dinilai mendesak untuk diadakan?*
- *Bagaimana bentuk dan definisi ketimpangan menurut persepsi warga?*
- *Apa sebab terjadinya ketimpangan menurut persepsi masyarakat?*
- *Usulan perbaikan apa yang diajukan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang tepat untuk menurunkan atau mengurangi ketimpangan?*

Keterangan

- “Kebijakan dan program sosial” adalah 6-7 program yang kini tengah dijalankan pemerintah, di antaranya PNPM, PKH, Jampersal, Jamkesma, Subsidi Pupuk, BOS.
- “Kementerian dan lembaga pemerintah” meliputi 6-7 lembaga yang mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
- “Kebijakan-program sosial” adalah program-program yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan sosial, di antaranya jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan subsidi.

Jawaban warga negara terhadap empat pertanyaan tersebut akan dikelompokkan ke dalam empat kelompok/kategori jawaban kualitatif dan nantinya akan dikuantifikasi dan diinterpretasikan sebagai berikut.

Penting dan bermanfaat/sangat baik (8-10)

- Baik/sedang (5-7)
- Kurang/buruk (3-4)
- Tidak tahu (1-2)

Indikator masing-masing pertanyaan adalah sebagai berikut.

- Kebijakan sosial yang penting dan bermanfaat: informasi tersedia/diterima, barang dan jasa tersebut benar diterima, tidak memberi beban/mudah dijangkau, menerima pelayanan dengan mudah, bermanfaat, tidak diskriminatif, tidak berbelit-belit, mekanisme pengaduan, dan lain-lain.
- Lembaga pemerintah yang berkinerja baik: programnya sesuai kebutuhan, penyaluran tepat waktu, sasarannya tepat, tidak ada pemotongan, tidak menambah beban, tidak ada korupsi, pelayanan mudah, transparans, partisipasi, dan mekanisme pengaduan.

- Kebijakan program sosial: program sosial yang dianggap penting dan mendesak untuk mengurangi beban atau memperluas kesempatan sosial warga tetapi belum ada dan belum dijanjikan, seperti jaminan kesehatan, subsidi pupuk, bantuan beasiswa, dan jaminan tunai tidak bersyarat.

5. Metode Riset

Pengukuran Barometer Sosial 2015 termasuk dalam jenis riset kuantitatif. Metode riset yang digunakan adalah metode kuantitatif yang mengandalkan perolehan data pada wawancara, observasi dan kuesioner. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau data yang diberi kode angka berdasarkan skala ordinal dan interval sehingga dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *self-report*. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri atas seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk memberikan pertanyaan dan mencatat jawaban (*self-report*). Melalui *self-report* partisipan diminta memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Dilihat dari tujuan dan pengolahan datanya, pengukuran barometer sosial ini termasuk dalam jenis riset deskriptif dan korelasional. Variabel-variabel yang diukur akan dideskripsikan dan dikorelasikan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antar-variabel.

6. Jumlah Responden dan Teknik Sampling

Jumlah responden mencakup 2010 orang. Mencakup responden di 34 provinsi di Indonesia. Metode survei yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuesioner.

Teknik sampling yang digunakan adalah *multistage random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara bertingkat, pertama dengan menentukan kelompok-

kelompok sampel, kemudian sampel dipilih secara random dari kelompok-kelompok itu. *Multistage random sampling* seperti *cluster sampling*, tetapi melibatkan pemilihan sampel dalam *cluster* yang dipilih. Dengan teknik ini, pemilihan sampel dilakukan paling sedikit pada dua tahap (*stage*).

7. Penyusunan Instrumen Pengukuran

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran barometer sosial dan ketimpangan sosial ini adalah alat ukur berupa skala dan kuesioner. Penyusunan alat ukur itu mengikuti langkah-langkah berikut ini.

- Identifikasi tujuan utama penggunaan alat ukur: Memperoleh Indeks Barometer Sosial dan Ketimpangan Sosial.
- Penentuan konstruk pengukuran: Komponen-komponen Barometer Sosial dan Ketimpangan Sosial.
- Identifikasi indikator yang mewakili konstruk dan mendefinisikan ranah (*domain*) Barometer Sosial dan Ketimpangan Sosial yang akan diukur.
- Menyiapkan rangkaian spesifikasi alat ukur, termasuk proporsi item yang akan dibuat berkaitan dengan tingkah laku yang akan diukur dari konstruk.
- Konstruksi sejumlah item (*items pooling*).
- *Review* item, uji keterbacaan, *expert judgment*, dan revisi.
- *Tryout*: Pengambilan data lapangan pada sejumlah sampel representatif dari populasi yang dituju oleh alat ukur.
- Analisis item: Pengujian statistik terhadap item-item alat ukur; jika diperlukan, menghilangkan item-item yang tidak memenuhi kriteria item yang baik atau melakukan revisi terhadap item-item tersebut.
- Uji reliabilitas dan validitas bentuk alat ukur final.
- Membuat manual administrasi, skoring, dan interpretasi terhadap skor alat ukur (di antaranya membuat tabel norma, standar performa, dan *cutting scores*).

8. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti. Teknik analisis data yang akan digunakan mencakup statistik deskriptif, teknik analisis korelasional dan pemodelan.

Untuk melihat gambaran umum subjek penelitian dilakukan perhitungan persentase, rata-rata (*mean*) serta penyebaran usia dan jenis kelamin subjek melalui statistik deskriptif. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen barometer sosial dan hubungannya masing-masing terhadap variabel lain dilakukan dengan perhitungan *multiple correlation* dan *multiple regresion*. Untuk melihat hubungan pengaruh antar-variabel barometer sosial digunakan analisis persamaan struktur (*structural equation modelling*) satu arah dengan hubungan resiprokal yang dilakukan dengan menggunakan perangkat-lunak Lisrel.



**NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of
the United Nations, Ref. No : D1035**

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12540

Phone : 021 7819734, 7819735

Email : info@infid.org

Website: www.infid.org